



**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
KECAMATAN CILONGOK  
TAHUN 2024**



**KECAMATAN CILONGOK**  
Jalan Raya Pernasidi No 7 Cilongok  
Telp/Fax 0281 655288 email [cilongok@banyumaskab.go.id](mailto:cilongok@banyumaskab.go.id)  
website [cilongokkec.banyumaskab.go.id](http://cilongokkec.banyumaskab.go.id)

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Alloh SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cilongok Tahun 2024, Renja ini sebagai penjabaran dari aktivitas kegiatan selama satu tahun dan merupakan amanat dari Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

1. RIPD;
2. RPJMD;
3. Renstra SKPD;
4. RKPD; dan
5. RENJA SKPD

Rencana Kerja ini memuat beberapa hal terkait dengan rencana yang akan dilakukan pada tahun 2024 diantaranya adalah :

- a. Program dan kegiatan;
- b. Lokasi kegiatan;
- c. Indikator kinerja;
- d. Kelompok sasaran; dan
- e. Pagu indikatif dan prakiraan maju

Semoga dengan adanya dokumen rencana kerja ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan penyusunan kegiatan di Kecamatan Cilongok, sehingga dapat menghasilkan output outcome sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Cilongok, September 2023

CAMAT CILONGOK



RONI HIDAYAT, S.STP.M.Si  
Pembina Tk I

NIP. 19760908 199602 1 003

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b> <b>Halaman</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I   PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II   EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
BAB III  TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	38
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	39
3.3 Program dan kegiatan	40
BAB IV  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	51
BAB IV  PENUTUP	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2024. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD; RPJMD ; Renstra SKPD; RKPD; dan RENJA SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 - 2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah ( RPD ) Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 yaitu :

**“BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI”**

Visi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan menjadi focus kerja Kecamatan Cilongok, sesuai Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dengan tema :

**“ Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta tata kelola yang efektif dan kolaboratif untuk mendukung pengembangan potensi daerah “**

Rencana Kerja Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **I.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
21. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 050.23/0000031

tanggal 02 Januari 2023 Tentang Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan, Serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
25. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 - 2026.

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2024 adalah:

1. Menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2024 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagai pedoman Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.



2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas selama tahun 2024.

#### **I.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun  $n-2$ ) dan perkiraan capaian tahun berjalan ( $n-1$ ), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

**2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**, menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,**

Menguraikan Rencana Kerja Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat dalam matrik renja Perangkat Daerah.

### **BAB V PENUTUP,**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

# **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

## **II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Cilongok tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

### ***A. Penetapan Indikator Kinerja***

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

### ***B. Capaian Analisis Kinerja***

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

### **Evaluasi Program Tahun 2022**

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan target kinerja Kecamatan Cilongok tahun 2022 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022. Jumlah anggaran belanja pada APBD Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp 3.926.074.934.204,00 terdiri dari belanja Operasi Rp 2.684.820.558.720,00, belanja Modal Rp 516.256.765.484,00, belanja Tak Terduga Rp 48.682.000.000,00 dan belanja transfer Rp 676.297.010.000,00. Penyerapan anggaran belanja Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.901.987.353,00, untuk belanja operasi sebesar Rp. 2.854.587.353,00 (98,37%) dan untuk belanja modal sebesar Rp. 47.400.000,00 (1,63%). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program dengan serapan anggaran terbesar (97,08%), sedangkan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. menunjukkan serapan terkecil (0,30%).

Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu terdiri dari lima program, 11 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam table T-C.29 sebagai berikut

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023  
Kecamatan Cilongok

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima							0		0	0
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		86	86.28	84	88.25	105		88.25	100
	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat							105		88.25	
		Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	100	100	100		100	100
		Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	%	90	100	80	80	100		80	88
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan							100		80	0

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 (Renstra Perubahan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
		Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100	100	100		100	100
		Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	90	80	85	85	100		85	94
		Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100	100	100		100	100
		Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	90	97.06	85	91.72	107		91.72	101
		Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	90	85	85	85	100		85	94
		Persentase Linmas terbina	%	90	85	100	100	100		85	94
	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan							100		85	0

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 (Renstra Perubahan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
		pemohon PATEN yang terlayani	%	100	100	100	100	100		100	100
		penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100		100	100
	Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa / Kelurahan							100		100	0
		Pelaksanaan Musrenbang di desa / kelurahan dan kecamatan	%	100	100	100	100	100		100	100
		Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan desa / kelurahan	Kali	20	4	4	4	100		8	40
		kegiatan perencanaan dan pembangunan desa / kelurahan yang terfasilitasi	Kali	5	1	1	1	100		2	40
		kegiatan pembinaan serta pengawasan pengelolaan Dana Desa / Dana Kelurahan yang terfasilitasi	Kali	5	1	1	1	100		2	40

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 (Renstra Perubahan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
	Fasilitasi Intensifikasi PBB							100		2	0
		Persentase PBB yang dapat terbayar	%	95	97.06	92	91.72	99		91.72	96
	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penganggulangan Kemiskinan Kecamatan							99		91.72	0
		Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	Kali	80	16	16	16	100		32	40
	Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan							100		32	0
		penanganan gangguan trantibum yang dilaksanakan sesuai SOP	%	100	100	100	100	100		100	100
		pelaksanaan rakor Linmas	Kali	20	4	4	4	100		8	40
		pembinaan kepada linmas	Kali	20	4	4	4	100		8	40



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban kecamatan yang tertangani	%	100	100	100	100	100		100	100
	Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes Kecamatan Cilongok							100		100	0
		Frekuensi Monitoring dan evaluasi Pengelolaan APBDes	Kali	10	2	2	2	100		4	40
		Frekuensi pembinaan dan pengawasan APBDes	Kali	10	2	2	2	100		4	40
		Prosentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan APBDes dan monitoring evaluasi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	%	100	100	100	100	100		100	100
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah							100		100	0

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 (Renstra Perubahan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
		Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100		100	100
		Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100	100	100		100	100
	Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							100		100	0
		Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	25	5	5	5	100		10	40
		Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Kali	20	4	4	4	100		8	40
	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran							100		8	0

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
		Persentase realisasi fisik program	%	100	90	100	95.78	95		95.78	95
		Persentase realisasi keuangan program	%	100	90	100	96.56	96		86.39	86
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah							86		86.39	0
		Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Bulan	60	12	12	12	100		12	20
		Jasa transaksi keuangan yang dibayar	Lump	5	1	1	1	100		1	20
	Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah							100		1	0
		bahan perlengkapan kerja tersedia	Bulan	60	1	12	12	100		12	20
		alat listrik dan elektronik yang tersedia	Jenis	2	2	2	2	100		4	200

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
		perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Buah	185	150	25	25	100		175	170
		Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	Bulan	12	1	12	12	100		12	100
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	Bulan	12	12	12	12	100		12	100
		cetak dan penggandaan yang tersedia	lbr	2677	40000	45000	30421	67		70421	2630
	Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah							67		70421	0
		Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Bulan	60	12	12	12	100		12	20

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 (Renstra Perubahan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah							100		12	0
		Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi	Bulan	60	12	12	12	100		12	20
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah							100		12	0
		peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	Jenis	10	10	10	10	100		20	200
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah							100		20	0
		peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Bulan	60	12	12	12	100		12	20

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah							100		12	0
		gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100		100	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah							100		100	0
		kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Bulan	60	12	12	12	100		12	20
		kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	Bulan	60	12	12	12	100		12	20
	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah							100		12	0
		Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Bulan	60	12	12	12	100		12	20

## **II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

#### 1. Tugas Pokok

membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan / atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

#### 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan Cilongok mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- d. Pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;

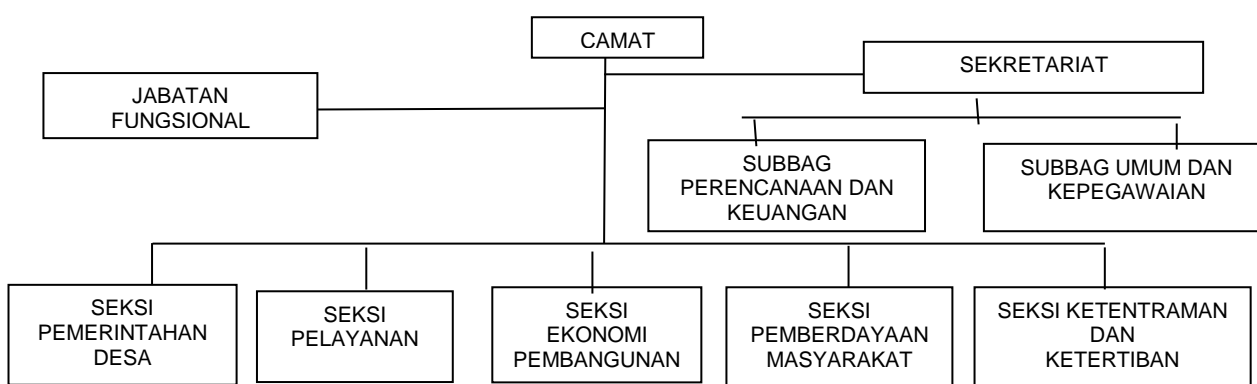
h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- h. Kelompok jabatan fungsional;

Gambar 1. Struktur organisasi Kecamatan Cilongok adalah sebagai berikut:





**Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2023**

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran belanja (perubahan) tahun 2023 sebesar Rp 2,945,506,171,00 terurai dalam 5 program dan 11 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau meningkat dari tahun 2022, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Tingkat Capaian RKPd 2022	Kenaikan /Penurunan
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
1	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100	100	0
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
1	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	0	100	0
C	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
1	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	0
D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
1	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	100	100	100	0
E	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
1	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	0
2	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100	100	0
3	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	0
4	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	0

### **II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023 dapat dikemukakan beberapa hal dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Cilongok sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan di tingkat kecamatan.
2. Kurang pahamnya masyarakat mengenai syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan.
3. Belum optimalnya jumlah petugas pelayanan dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kecamatan Cilongok
4. Masih seringnya terjadi kendala pada sistem milik Dindukcapil yang berada di Kecamatan dan belum sinkronya aplikasi sistem data kependudukan antara kecamatan dan dinas kependudukan dan catatan sipil.
5. Belum optimalnya kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD

#### **Permasalahan**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cilongok. Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

#### **A. Strenght (Kekuatan)**

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. SDM Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 25 orang yang didominasi oleh pendidikan S1 dan SLTA. Dilihat dari pendidikan regular, pegawai Kecamatan Cilongok Kab. Banyumas sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan
3. Sarana dan Prasarana  
Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.
4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan, kita juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Adanya masalah-masalah terkait dengan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan antara lain:
  - Keterlibatan stakeholders dalam proses penyusunan teknis operasional belum optimal dalam mengkritisi usulan-usulan OPD.
  - Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi kegiatan sebagai bahan perencanaan kegiatan, sehingga perencanaan yang disusun belum bisa simultan dan komprehensif.

- Masih adanya usulan-usulan kegiatan yang diajukan pada saat dokumen RKPD telah ditetapkan, sehingga kegiatan tersebut tidak tercover dalam dokumen RKPD.
- Tuntutan pelaksanaan Musrenbang yang partisipatif masih belum secara maksimal dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses Musrenbang.

#### C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan. Peluang-peluang tersebut adalah:

1. Adanya kebijakan otonomi daerah ( desentralisasi ) yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program;
3. Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan;
4. Komitmen perangkat daerah lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan dukungan database perencanaan dari Perangkat Daerah lain;
5. Adanya dukungan dari eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan;
6. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Banyaknya Lembaga-Lembaga Litbang yang bisa menjadi mitra kerja;
8. Telah disusunnya produk-produk hukum yang memberikan kewenangan dan petunjuk dalam penyusunan proses perencanaan pembangunan.

#### D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Ancaman yang mungkin terjadi antara lain:

1. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme pembangunan partisipatif;

2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
3. Perbedaan persepsi tentang mekanisme perencanaan pembangunan antara legislatif dan eksekutif;
4. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi antar Perangkat Daerah;
5. Kebutuhan perencanaan dan implementasi pembangunan yang komprehensif dan saling terintegrasi;
6. Perubahan peraturan perundangan;

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup;
2. Adanya mekanisme teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;

5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- Kurangnya keterlibatan stakeholders pada proses penyusunan perencanaan pembangunan dalam mengkritisi usulan-usulan OPD.
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan yang terkait dengan dokumen perencanaan
- Pelaksananaan perencanaan tidak tepat waktu karena mekanisme tahapan panjang dan melibatkan banyak pihak dengan peraturan perundangan yang dinamis
- Tuntutan pelaksanaan Musrenbang yang partisipatif masih belum terwujud secara maksimal karena belum sinergisnya kepentingan yang diakomodir

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Cilongok dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah ( RPD ) Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2024 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang telah ditempuh Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas analisis perencanaan umum pembangunan daerah
2. Meningkatkan kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD
3. Meningkatkan realisasi pelaksanaan kajian strategi daerah
4. Meningkatkan fasilitasi penerapan inovasi daerah
5. Meningkatkan kualitas dan penyebarluasan informasi perencanaan
6. Meningkatkan kualitas analisis perencanaan bidang infrastruktur dan prasarana wilayah

7. Meningkatkan kualitas analisis perencanaan pembangunan ekonomi
8. Meningkatkan kualitas analisis perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia
9. Meningkatkan pelayanan perkantoran
10. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan perangkat daerah

#### **II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rancangan awal RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada lampiran tabel C-T.31. Rancangan awal RKPD tahun 2024 menunjukkan Kecamatan Cilongok memiliki 6 program dan 13 kegiatan 35 Sub Kegiatan.

Tabel T-C.31

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 Kecamatan Cilongok Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2025	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
<b>KECAMATAN CILONGOK</b>			<b>3,132,606,000</b>					<b>3,205,010,000</b>
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>			<b>117,695,001</b>			<b>117,695,001</b>		<b>139,220,000</b>
<b>KECAMATAN</b>			<b>117,695,001</b>	-	-	<b>117,695,001</b>		<b>139,220,000</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>88,5 Indeks</b>	<b>11,725,000</b>	-	-	<b>11,725,000</b>	<b>89 Indeks</b>	<b>13,625,000</b>
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>900.000</b>	-	-	<b>900.000</b>	<b>100%</b>	<b>900.000</b>
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	900.000	-	-	900.000	3 Laporan	900.000
<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum</b>	<b>100%</b>	<b>900.000</b>	-	-	<b>900.000</b>	<b>100%</b>	<b>900.000</b>
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam	2 Dokumen	900.000	-	-	900.000	2 Dokumen	900.000



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2025	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Prasarana Pelayanan Umum	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum							
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>	<b>100%</b>	<b>9,925,000</b>	-	-	<b>9,925,000</b>	<b>100%</b>	<b>11,825,000</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	6,550,000	-	-	6,550,000	12 Laporan	6,550,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9 Laporan	3,375,000	-	-	3,375,000	9 Laporan	5,275,000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>38,045,000</b>	-	-	<b>38,045,000</b>	<b>100%</b>	<b>39,645,000</b>
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase kegiatan pemberdayaan desa</b>	<b>100%</b>	<b>38,045,000</b>	-	-	<b>38,045,000</b>	<b>100%</b>	<b>39,645,000</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	14,015,000	-	-	14,015,000	7 Lembaga Kemasyarakatan	14,015,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2025	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen	6,335,000	-	-	6,335,000	12 Dokumen	6,335,000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	17,695,000	-	-	17,695,000	4 Laporan	19,295,000
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas</b>	<b>100%</b>	<b>28,205,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,205,000</b>	<b>100%</b>	<b>28,205,000</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan</b>	<b>100%</b>	<b>28,205,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,205,000</b>	<b>100%</b>	<b>28,205,000</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	22,535,000	-	-	22,535,000	12 Laporan	22,535,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2025	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	5,670,000	-	-	5,670,000	2 Laporan	5,670,000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan</b>	<b>100%</b>	<b>26,200,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,200,000</b>	<b>100%</b>	<b>26,200,000</b>
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>26,200,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,200,000</b>	<b>100%</b>	<b>26,200,000</b>
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	130 Orang	2,200,000	-	-	2,200,000	130 Orang	2,200,000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	24,000,000	-	-	24,000,000	6 Dokumen	24,000,000
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase APBDes tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>13,520,001</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,520,001</b>	<b>100%</b>	<b>31,545,000</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2025	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase desa yang mendapatkan pendampingan</b>	<b>100%</b>	<b>13,520,001</b>	-	-	<b>13,520,001</b>	<b>100%</b>	<b>31,545,000</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	5,395,000	-	-	5,395,000	2 Dokumen	5,395,000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	8,125,000	-	-	8,125,000	2 Dokumen	8,125,000
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	1	-	-	1	1 Dokumen	18,025,000
<b>NON URUSAN</b>			<b>3,014,910,999</b>	-	-	<b>3,014,910,999</b>		<b>3,065,790,000</b>
<b>NON URUSAN</b>			<b>3,014,910,999</b>	-	-	<b>3,014,910,999</b>		<b>3,065,790,000</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3,014,910,999</b>	-	-	<b>3,014,910,999</b>	<b>100%</b>	<b>3,065,790,000</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2025	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9 Dokumen</b>	<b>2,792,500</b>	-	-	<b>2,792,500</b>	<b>9 Dokumen</b>	<b>2,792,500</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1,432,500	-	-	1,432,500	5 Dokumen	1,432,500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1,360,000	-	-	1,360,000	3 Laporan	1,360,000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>2,183,708,699</b>	-	-	<b>2,183,708,699</b>	<b>100%</b>	<b>2,213,708,700</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2,149,448,699	-	-	2,149,448,699	19 Orang/bulan	2,179,448,700
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	34,260,000	-	-	34,260,000	4 Dokumen	34,260,000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>177,790,400</b>	-	-	<b>177,790,400</b>	<b>100%</b>	<b>183,445,200</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2025	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4,420,000	-	-	4,420,000	3 Paket	4,420,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	17,333,100	-	-	17,333,100	4 Paket	17,333,100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	6,356,000	-	-	6,356,000	3 Paket	6,356,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	53,877,500	-	-	53,877,500	4 Paket	53,877,500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11,135,800	-	-	11,135,800	2 Paket	11,135,800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	81,678,000	-	-	81,678,000	120 Laporan	87,332,800
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	2,990,000	-	-	2,990,000	3 Dokumen	2,990,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2025	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang</b>	<b>100%</b>	<b>68,000,000</b>	-	-	<b>68,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>75,000,000</b>
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	15,000,000	-	-	15,000,000	3 Unit	15,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	53,000,000			53,000,000	10 Unit	60,000,000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>100%</b>	<b>358,194,400</b>			<b>358,194,400</b>	<b>100%</b>	<b>380,218,600</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60,114,000			60,114,000	12 Laporan	63,321,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9,550,000			9,550,000	2 Laporan	9,550,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	288,530,400			288,530,400	12 Laporan	307,347,600
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>224,425,000</b>			<b>224,425,000</b>	<b>100%</b>	<b>210,625,000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	38,400,000			38,400,000	9 Unit	39,100,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2025	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	7,500,000			7,500,000	10 Unit	7,500,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	15,625,000			15,625,000	30 Unit	16,125,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	155,400,000			155,400,000	2 Unit	140,400,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	7,500,000			7,500,000	10 Unit	7,500,000



## **BAB III**

# **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Prioritas pembangunan daerah tahun 2024 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2024 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Tema Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah ***"Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan upaya untuk mencapai target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020–2024 dan menciptakan landasan yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan tahun 2025–2029 dengan tetap menjaga stabilitas pada tahun pemilihan umum"***.

Dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2024 ada 7 prioritas Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RKP 2024 yang mana kebijakannya diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2024 ditujukan pada **"Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari"**, dengan prioritas pembangunan daerah diarahkan pada:

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis;

Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sesuai RPD tahun 2024-2026 mempertimbangkan isu pembangunan global, nasional dan isu strategis pembangunan daerah, maka Prioritas Daerah dirumuskan untuk memberikan panduan dan penekanan agar kebijakan-kebijakan yang dirumuskan mampu membawa kearah yang tepat, optimal dan sinergi satu sama lain, sehingga semua program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menghasilkan output dan capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 untuk Peningkatan ekonomi dengan penguatan daya saing ekonomi dan SDM dengan mempertimbangkan prioritas nasional, maka Kabupaten Banyumas melakukan penyesuaian prioritas Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

- 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing,
- 2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah,
- 3 Menangani Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- 4 Memperkuat Ketahanan Pangan;

### **III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Cilongok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang melaksanakan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan di Kabupaten Banyumas, membantu Bupati

Banyumas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Rencana pembangunan disesuaikan dengan visi RPJPD Kabupaten Banyumas 2005-2025 adalah "**Banyumas 2025 Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, Serta Lestari**"

Visi RPD Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 dijabarkan kedalam 4 (empat) misi, yaitu:

Misi 1 : Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera,

Misi 2 : Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri,

Misi 3 : Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing,

Misi 4 : Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2024 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Cilongok Kab. Banyumas tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan

### **III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kecamatan Cilongok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang melaksanakan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan di Kabupaten Banyumas. Penyusunan perencanaan sesuai dengan tugas pokok fungsi Kecamatan Cilongok dalam rangka mendukung Bupati Banyumas dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

Kecamatan Cilongok mempunyai 6 program dan 13 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lima seksi dan sekretariat. Berikut merupakan total kebutuhan dana tahun 2024 yaitu Rp 2.658.568.000,00 dengan sumber pendanaan APBD Kabupaten sebesar Rp 2.658.568.000,00 Berikut lampiran rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2024 pada table T-C.33

Tabel T-C.33  
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra 2024-2026  
Kecamatan Cilongok  
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Tahun 2025	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								
<b>KECAMATAN</b>			<b>3,132,606,000</b>	0	0	<b>3,132,606,000</b>		<b>3,205,010,000</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>88,5 Indeks</b>	<b>11,725,000</b>	-	-	<b>11,725,000</b>	<b>89 Indeks</b>	<b>13,625,000</b>
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>900.000</b>	-	-	<b>900.000</b>	<b>100%</b>	<b>900.000</b>
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	900.000	-	-	900.000	3 Laporan	900.000
<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum</b>	<b>100%</b>	<b>900.000</b>	-	-	<b>900.000</b>	<b>100%</b>	<b>900.000</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Tahun 2025	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	900.000	-	-	900.000	2 Dokumen	900.000
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>	<b>100%</b>	<b>9,925,000</b>	-	-	<b>9,925,000</b>	<b>100%</b>	<b>11,825,000</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	6,550,000	-	-	6,550,000	12 Laporan	6,550,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9 Laporan	3,375,000	-	-	3,375,000	9 Laporan	5,275,000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>38,045,000</b>	-	-	<b>38,045,000</b>	<b>100%</b>	<b>39,645,000</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Tahun 2025	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase kegiatan pemberdayaan desa</b>	<b>100%</b>	<b>38,045,000</b>	-	-	<b>38,045,000</b>	<b>100%</b>	<b>39,645,000</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	14,015,000	-	-	14,015,000	7 Lembaga Kemasyarakatan	14,015,000
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen	6,335,000	-	-	6,335,000	12 Dokumen	6,335,000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	17,695,000	-	-	17,695,000	4 Laporan	19,295,000
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas</b>	<b>100%</b>	<b>28,205,000</b>	-	-	<b>28,205,000</b>	<b>100%</b>	<b>28,205,000</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Tahun 2025	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan</b>	100%	28,205,000	-	-	28,205,000	100%	28,205,000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	22,535,000	-	-	22,535,000	12 Laporan	22,535,000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	5,670,000	-	-	5,670,000	2 Laporan	5,670,000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan</b>	100%	26,200,000	-	-	26,200,000	100%	26,200,000
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan</b>	100%	26,200,000	-	-	26,200,000	100%	26,200,000



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Tahun 2025	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	130 Orang	2,200,000	-	-	2,200,000	130 Orang	2,200,000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	24,000,000	-	-	24,000,000	6 Dokumen	24,000,000
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase APBDes tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>13,520,001</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,520,001</b>	<b>100%</b>	<b>31,545,000</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase desa yang mendapatkan pendampingan</b>	<b>100%</b>	<b>13,520,001</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,520,001</b>	<b>100%</b>	<b>31,545,000</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	5,395,000	-	-	5,395,000	2 Dokumen	5,395,000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	8,125,000	-	-	8,125,000	2 Dokumen	8,125,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Tahun 2025	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	1	-	-	1	1 Dokumen	18,025,000
<b>NON URUSAN</b>			<b>3,014,910,999</b>	-	-	<b>3,014,910,999</b>		<b>3,065,790,000</b>
<b>NON URUSAN</b>			<b>3,014,910,999</b>	-	-	<b>3,014,910,999</b>		<b>3,065,790,000</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3,014,910,999</b>	-	-	<b>3,014,910,999</b>	<b>100%</b>	<b>3,065,790,000</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9 Dokumen</b>	<b>2,792,500</b>	-	-	<b>2,792,500</b>	<b>9 Dokumen</b>	<b>2,792,500</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1,432,500	-	-	1,432,500	5 Dokumen	1,432,500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1,360,000	-	-	1,360,000	3 Laporan	1,360,000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>2,183,708,699</b>	-	-	<b>2,183,708,699</b>	<b>100%</b>	<b>2,213,708,700</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Tahun 2025	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2,149,448,699	-	-	2,149,448,699	19 Orang/bulan	2,179,448,700
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	34,260,000	-	-	34,260,000	4 Dokumen	34,260,000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>177,790,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>177,790,400</b>	<b>100%</b>	<b>183,445,200</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4,420,000	-	-	4,420,000	3 Paket	4,420,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	17,333,100	-	-	17,333,100	4 Paket	17,333,100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	6,356,000	-	-	6,356,000	3 Paket	6,356,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	53,877,500	-	-	53,877,500	4 Paket	53,877,500

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Tahun 2025	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11,135,800	-	-	11,135,800	2 Paket	11,135,800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	81,678,000	-	-	81,678,000	120 Laporan	87,332,800
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	2,990,000	-	-	2,990,000	3 Dokumen	2,990,000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang</b>	<b>100%</b>	<b>68,000,000</b>	-	-	<b>68,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>75,000,000</b>
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	15,000,000	-	-	15,000,000	3 Unit	15,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	53,000,000			53,000,000	10 Unit	60,000,000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>100%</b>	<b>358,194,400</b>			<b>358,194,400</b>	<b>100%</b>	<b>380,218,600</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60,114,000			60,114,000	12 Laporan	63,321,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9,550,000			9,550,000	2 Laporan	9,550,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Tahun 2025	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	288,530,400			288,530,400	12 Laporan	307,347,600
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>224,425,000</b>			<b>224,425,000</b>	<b>100%</b>	<b>210,625,000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	38,400,000			38,400,000	9 Unit	39,100,000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	7,500,000			7,500,000	10 Unit	7,500,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	15,625,000			15,625,000	30 Unit	16,125,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	155,400,000			155,400,000	2 Unit	140,400,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	7,500,000			7,500,000	10 Unit	7,500,000

## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2024 ditunjukkan pada lampiran matrik renja yang telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai berikut:

Matrik Tahun 2024 berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

KECAMATAN CILONGOK

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total	
				3,132,606,000	0	0	3,132,606,000	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas				3,132,606,000	0	0	3,132,606,000	
	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	3,132,606,000	0	0	3,132,606,000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan				117,695,001	0	0	117,695,001	
	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	117,695,001	0	0	117,695,001	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				13,520,001	0	0	13,520,001	
	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	13,520,001	0	0	13,520,001	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				13,520,001	0	0	13,520,001	

	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	100	13,520,001	0	0	13,520,001	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5,395,000	0	0	5,395,000	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2	5,395,000	0	0	5,395,000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				8,125,000	0	0	8,125,000	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2	8,125,000	0	0	8,125,000	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1	0	0	1	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	1	0	0	1	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				11,725,000	0	0	11,725,000	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	11,725,000	0	0	11,725,000	



Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				900.000	0	0	900.000	
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	900.000	0	0	900.000	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				900.000	0	0	900.000	
	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	3	900.000	0	0	900.000	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				900.000	0	0	900.000	
	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	100	900.000	0	0	900.000	

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				900.000	0	0	900.000	
	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	2	900.000	0	0	900.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9,925,000	0	0	9,925,000	
	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	9,925,000	0	0	9,925,000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				6,550,000	0	0	6,550,000	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	6,550,000	0	0	6,550,000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3,375,000	0	0	3,375,000	

	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	9	3,375,000	0	0	3,375,000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				28,205,000	0	0	28,205,000	
	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	28,205,000	0	0	28,205,000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				28,205,000	0	0	28,205,000	
	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	%	100	28,205,000	0	0	28,205,000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				22,535,000	0	0	22,535,000	
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	22,535,000	0	0	22,535,000	

Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				5,670,000	0	0	5,670,000	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	5,670,000	0	0	5,670,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				38,045,000	0	0	38,045,000	
	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	38,045,000	0	0	38,045,000	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				38,045,000	0	0	38,045,000	
	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	%	100	38,045,000	0	0	38,045,000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				14,015,000	0	0	14,015,000	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	7	14,015,000	0	0	14,015,000	

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				6,335,000	0	0	6,335,000	
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	12	6,335,000	0	0	6,335,000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				17,695,000	0	0	17,695,000	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	17,695,000	0	0	17,695,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				26,200,000	0	0	26,200,000	
	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	26,200,000	0	0	26,200,000	

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				26,200,000	0	0	26,200,000	
	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	%	100	26,200,000	0	0	26,200,000	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				2,200,000	0	0	2,200,000	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	130	2,200,000	0	0	2,200,000	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				24,000,000	0	0	24,000,000	
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	24,000,000	0	0	24,000,000	
				3,014,910,999	0	0	3,014,910,999	
	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	76.15	3,014,910,999	0	0	3,014,910,999	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,014,910,999	0	0	3,014,910,999	
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	3,014,910,999	0	0	3,014,910,999	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				224,425,000	0	0	224,425,000	
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	224,425,000	0	0	224,425,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				38,400,000	0	0	38,400,000	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9	38,400,000	0	0	38,400,000	
Pemeliharaan Mebel				7,500,000	0	0	7,500,000	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	7,500,000	0	0	7,500,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15,625,000	0	0	15,625,000	

	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	15,625,000	0	0	15,625,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				155,400,000	0	0	155,400,000	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Unit	2	155,400,000	0	0	155,400,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7,500,000	0	0	7,500,000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Unit	10	7,500,000	0	0	7,500,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				177,790,400	0	0	177,790,400	
	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	177,790,400	0	0	177,790,400	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4,420,000	0	0	4,420,000	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan	Paket	3	4,420,000	0	0	4,420,000	



	Bangunan Kantor yang Disediakan							
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17,333,100	0	0	17,333,100	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	17,333,100	0	0	17,333,100	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6,356,000	0	0	6,356,000	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	6,356,000	0	0	6,356,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				53,877,500	0	0	53,877,500	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	53,877,500	0	0	53,877,500	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11,135,800	0	0	11,135,800	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	11,135,800	0	0	11,135,800	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				81,678,000	0	0	81,678,000	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	81,678,000	0	0	81,678,000	

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2,990,000	0	0	2,990,000	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	2,990,000	0	0	2,990,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				358,194,400	0	0	358,194,400	
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	%	100	358,194,400	0	0	358,194,400	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60,114,000	0	0	60,114,000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	60,114,000	0	0	60,114,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9,550,000	0	0	9,550,000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	9,550,000	0	0	9,550,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				288,530,400	0	0	288,530,400	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	288,530,400	0	0	288,530,400	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				68,000,000	0	0	68,000,000	
	Persentase Pengadaan Barang	%	100	68,000,000	0	0	68,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				53,000,000	0	0	53,000,000	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	53,000,000	0	0	53,000,000	
Pengadaan Mebel				15,000,000	0	0	15,000,000	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	15,000,000	0	0	15,000,000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2,792,500	0	0	2,792,500	
	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	2,792,500	0	0	2,792,500	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1,432,500	0	0	1,432,500	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	1,432,500	0	0	1,432,500	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,360,000	0	0	1,360,000	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	1,360,000	0	0	1,360,000	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,183,708,699	0	0	2,183,708,699	
	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	100	2,183,708,699	0	0	2,183,708,699	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2,149,448,699	0	0	2,149,448,699	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	2,149,448,699	0	0	2,149,448,699	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				34,260,000	0	0	34,260,000	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	34,260,000	0	0	34,260,000	

## BAB V

# P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Cilongok tahun 2024. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Kecamatan Cilongok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2024, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Kecamatan Cilongok Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2024 dan Rencana Strategis Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perubahan-OPD) Tahun 2018-2024 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. Kecamatan Cilongok dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja Kecamatan Cilongok menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2024 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **“Banyumas 2025 Sejahtera, Mandiri, Maju Dan Berdaya Saing, Serta Lestari”** ”.



RONI HIDAYAT, S.STP., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19760908 199602 1 003